

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dampak adanya wabah Covid-19 yang mulai merambah Indonesia pada Maret 2020 telah menimbulkan banyak kerugian di berbagai sektor, khususnya perekonomian. Keterbatasan gerak usaha masyarakat mengakibatkan perekonomian rakyat terus melorot. Banyaknya usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar di masa pandemi juga mengakibatkan sumber penghasilan masyarakat desa berkurang, baik petani, pedagang, ataupun pegawai yang akhirnya banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berkurangnya sumber penghasilan ini juga berakibat serius pada kemampuan daya beli dan kemampuan menabung masyarakat.

Demikian halnya dengan masyarakat di pedesaan, perputaran barang yang dimulai dari petani, berlanjut ke pedagang, dan berakhir di konsumen mengalami gangguan akibat kemampuan daya beli masyarakat sebagai konsumen yang jauh berkurang, terutama pekerja di perkotaan dan siswa yang tinggal di kota memilih untuk pulang kampung. Akibatnya hasil pertanian tidak terjual maksimal, karena permintaan hasil pertanian menurun, yang berakibat dan berdampak pada perekonomian para pedagang, serta pedagang yang akhirnya juga tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Penurunan harga hasil pertanian ini, yang diakibatkan adanya daya beli menurun, sehingga masyarakat pedesaan baik yang berprofesi sebagai pedagang maupun petani menjadi sama-sama terpuruk.

Desa merupakan basis terdepan dalam menuju suatu kemandirian, dikarenakan desa memiliki suatu kontribusi penting sebagai aset pembangunan

nasional. Desa dipandang memiliki keuntungan komperatif, karena memiliki *resources* yang besar seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan kebudayaan yang memiliki nilai jual tinggi. Oleh karena itu keberadaan desa dipandang perlu untuk diberdayakan sehingga memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Desa adat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki daerah sendiri, pemerintahan sendiri, terutama bersifat keagamaan dan sosial kemasyarakatan desa yang masyarakatnya masih guyub. Dengan semakin meningkat dan kompleksnya kebutuhan masyarakat dan pengaruh teknologi informatika di era globalisasi, desa adat memegang peranan penting dalam mempertahankan dan menata serta membina kehidupan masyarakat agar terhindar dari pengaruh buruk pesatnya perkembangan zaman.

Mengingat peranan Desa Adat begitu besar dalam mengantisipasi dinamika sosial ekonomi global, maka dipandang perlu untuk memodifikasi kegiatan desa adat ke arah usaha produktif, yang tidak hanya bernuansa sosial tetapi juga secara ekonomis. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur 972 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Tujuan utama dikeluarkannya SK tersebut selain untuk memberdayakan Desa Adat, juga termasuk usaha untuk melindungi masyarakat pedesaan dari incaran para renternir.

Peranan LPD ini semakin berkembang dan bidang usaha pun semakin luas, sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian, karena LPD merupakan usaha yang dinamis sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian, sehingga usaha LPD bukan saja sebagai penyimpanan dan pemberian kredit, tetapi juga sebagai alat lalu lintas pembayaran, stabilitas dan

pembayaran, stabilitas dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu desa. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa LPD adalah suatu lembaga perantara lalu lintas keuangan desa, maupun sebagai sumber pembiayaan pembangunan wilayah desa yang ada di Bali (Priantara, 2019).

Keberadaan LPD belum sepenuhnya berperan secara maksimal bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan kesadaran masyarakat dalam perilaku pengelolaan keuangan pribadinya masih tergolong rendah. Banyak masyarakat tidak memiliki dana simpanan. Dana simpanan untuk keperluan darurat yang dimiliki masyarakat berupa investasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang masyarakat pedesaan tergolong jarang ditemukan, karena kesadaran menabung sebelum menjadi nasabah LPD tidak ada, sehingga Covid-19 mengakibatkan goyahnya perekonomian masyarakat.

Goyahnya perekonomian masyarakat, terutama perekonomian masyarakat Bali dikarenakan sektor utama yang terpengaruh pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata baik masyarakat yang bekerja langsung di bidang pariwisata maupun tidak terlibat langsung dalam bidang pariwisata. Salah seorang masyarakat Desa Adat Gunung Kangin yang berjualan sayur di Pasar Jimbaran, Ni Nyoman Wartini mengaku sangat terdampak terhadap penghasilannya. Ia mengatakan, masyarakat yang tinggal di sekitar tempatnya berjualan merupakan orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata baik itu perhotelan, tempat hiburan, ataupun *catering* yang menyediakan makanan untuk karyawan hotel, yang tentunya mengalami kemunduran ekonomi akibat pandemi ini. Dikarenakan barang dagangan yang sepi pembeli, menyebabkan Ni Nyoman Wartini harus mengurangi jumlah barang dagangannya agar tetap dapat bertahan. Namun hal ini menurutnya juga berdampak

bagi petani yang menjual hasil panen kepadanya karena harus mengurangi menerima hasil panen tersebut.

Untuk menjaga kemungkinan perputaran modal dagangannya yang semakin sulit, ia memutuskan untuk menabung di LPD Desa Adat Gunung Kangin. Keputusannya ini serta merta dikarenakan akses yang mudah. Ia mengaku menabung setiap hari di LPD tetapi ketika modalnya berkurang maka uang simpanannya tersebut akan ditarik kembali dan seperti itulah cara beliau untuk mengelola keuangan untuk tetap bertahan di masa pandemic sampai berangsur-angsur keadaan perekonomian mulai membaik. Keadaan Ni Nyoman Wartini tersebut tidak hanya dialaminya sendiri, tetapi juga masyarakat Desa Adat Gunung Kangin yang berprofesi sebagai pedagang sayur yang sebagian besar berjualan di wilayah Badung ataupun Denpasar yang wilayahnya bergantung pada sektor pariwisata.

Berikut adalah data pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Adat Gunung Kangin.

Tabel 1.1  
Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Adat Gunung Kangin

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Pelajar	135
Petani	176
Pedagang	88
PNS/TNI/POLRI	24
Karyawan Swasta	46
Tukang/Buruh Harian	37
Wiraswasta	18
Peternakan	2
Tidak Bekerja	27
Jumlah	553

Sumber: Data Pengamatan, 2022

Lokasi desa yang dekat dengan kawasan pariwisata seperti Kebun Raya Bedugul dan Ulun Danau Beratan, hotel, dan restoran cukup berdampak bagi

perekonomian masyarakat. Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian yang hasil pertaniannya sebagian besar di pasarkan ke wilayah Badung dan Denpasar yang sangat berdampak karena pandemi, mengakibatkan hasil pertanian yang dapat di pasarkan menurun. Hal ini diantisipasi masyarakat petani dengan menanam tanaman yang tidak sejenis dengan jumlah yang sedikit. Dengan itu, hasil panen petani tetap bisa di pasarkan oleh para pedagang sayur mayur. Selain di pasarkan ke wilayah Badung dan Denpasar, hasil pertanian juga di pasarkan di Pasar Tradisional Baturiti dan Pasar Induk Sayur sebagai pasar terdekat. Fluktuasi harga hasil pertanian yang tidak sebanding dengan permintaan pasar tentunya sama- sama menyulitkan baik bagi petani ataupun pedagang.

Lokasi pedesaan yang dikelilingi oleh lahan kering dan lahan basah juga curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan petani harus menentukan jenis tanaman yang tepat untuk ditanam. Untuk petani di lahan basah (sawah), petani harus memutuskan apakah lahannya digunakan seluruhnya untuk menanam padi atau menyisakan sebidang tanah yang umumnya untuk digunakan bertani seperti sayur mayur, bunga pacar air dan tanaman holtikultura lain dengan usai panen cepat. Sedangkan untuk petani di lahan kering dapat bertani sepanjang tahun. Selain curah hujan yang tinggi, harga bibit yang tinggi, juga ada risiko hama yang cukup tinggi sehingga petani harus menyiapkan dana lebih untuk membeli obat-obatan pembasmi hama untuk mempertahankan hasil panennya.

Sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi keuangan, keberadaan desa yang dekat dengan kawasan pariwisata dan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, LPD Desa Adat Gunung Kangin berupaya menjalankan perannya dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan baik. Namun peran LPD

tersebut harus didukung dengan kepercayaan masyarakat serta perilaku pengelolaan keuangan pribadi masyarakat agar optimalisasi penggunaan modal dari LPD dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tingkat pembayaran kredit juga tidak terganggu. Dari jumlah total 1.436 LPD di Bali, pada tahun buku 2020, LPD Desa Adat Gunung Kangin merupakan salah satu LPD yang mencatat pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali, I Nengah Karma Yasa yang dikutip melalui BisnisBali.com yaitu LPD yang wilayahnya tidak dominan bergantung pada sektor pariwisata tidak terlalu berdampak akibat Covid-19. Lebih lanjut, I Nengah Karma menambahkan, LPD yang berada di kabupaten yang potensi unggulannya di sektor pertanian memiliki perkembangan yang cukup bagus.

Menurut penuturan I Wayan Suparta, S.T. selaku ketua LPD Desa Adat Gunung Kangin, LPD Desa Adat Gunung Kangin merupakan LPD yang terlihat sehat karena transaksi-transaksi keuangan masih terjadi secara normal. Namun kenyataannya nasabah yang aktif hanya organisasi-organisasi kemasyarakatan saja yaitu Sekaa Teruna Teruni, Pecalang, Kelompok Subak Abian, Kelompok Subak Toya dan Dana Desa Adat, serta terdapat nasabah-nasabah kredit yang mengalami kredit macet namun tidak dilakukan upaya penagihan dari petugas LPD sebelumnya. Dengan keadaan seperti itu serta adanya keinginan untuk menjadikan LPD menjadi lebih baik, I Wayan Suparta bersama dengan Bendesa Adat mengajukan kepada Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Tabanan agar mendapatkan pendampingan yang intensif. Oleh karena itu, selain karena Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa LPLPD melaksanakan pemberdayaan LPD melalui pendampingan dan

pengawasan, juga berakar dari keinginan prajuru adat serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menghidupkan kembali keberadaan LPD yang sehat dalam rangka mendukung kondisi ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh LPLPD Tabanan, pencatatan keuangan LPD menjadi terorganisir serta kredit-kredit bermasalah di kepengurusan sebelumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dengan adanya kenyataan tersebut, LPD Desa Adat Gunung Kangin akhirnya meraih kepercayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah serta saldo yang juga meningkat.

Tabel 1.2  
Rekapitulasi Nasabah LPD Desa Adat Gunung Kangin

	Desember 2019	April 2020	Desember 2020	Desember 2021	Juni 2022
Tabungan	0	183	447	793	759
Deposito	0	8	42	49	42
Kredit	32	66	212	235	218
Jumlah (orang)	32	257	701	1077	1019

Sumber : Laporan Bulanan LPD Desa Adat Gunung Kangin

Tabel 1.3  
Rekapitulasi Saldo LPD Desa Adat Gunung Kangin

(dalam ribuan rupiah)	Desember 2019	April 2020	Desember 2020	Desember 2021	Juni 2022
Tabungan	0	291.997	1.166.426	1.305.274	1.558.329
Deposito	0	147.000	827.000	1.571.000	1.633.000
Kredit	66.825	296.113	1.757.902	2.401.172	2.642.600

Sumber : Laporan Bulanan LPD Desa Adat Gunung Kangin

Peningkatan tersebut merupakan hasil yang cukup baik karena kepercayaan masyarakat desa Gunung Kangin terhadap LPD Desa Adat Gunung Kangin akhirnya didapatkan. Masyarakat yang sebelumnya melakukan penyimpanan uang secara tradisional seperti menyimpan di almari, di bawah tempat tidur, ataupun

tempat-tempat yang dipandang aman untuk mereka menyimpan uang. Dan ketika dalam suatu keadaan memerlukan uang, mereka akan menjual hewan ternak berupa sapi atau babi, menjual hasil pertaniannya dengan sistem tebasan, ataupun mengusahakan untuk meminjam kepada sanak saudara. Selain uang yang dimilikinya rentan hilang dan tidak aman, tetapi juga terlihat keuangan yang dimiliki oleh masyarakat tidak stabil.

Ketidakstabilan keuangan masyarakat juga diakibatkan oleh pengelolaan keuangannya yang kurang baik. Sebagai contoh, masyarakat yang berprofesi sebagai petani ketika dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan penghasilannya secara signifikan. Oleh karena itu, petani tersebut akan membeli barang secara konsumtif seperti emas ataupun kendaraan bermotor dari hasil panen tersebut. Namun ketika terjadi hal yang mendesak mereka akan mengalami kesulitan secara keuangan. Dalam hal ini, keberadaan LPD tentunya memainkan peranan penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku pengelolaan keuangan pribadi yang baik.

Salah seorang nasabah LPD Desa Adat Gunung Kangin yang bernama Made Ady mengatakan bahwa ia melakukan pengajuan kredit ke LPD dengan tujuan untuk mendapatkan modal untuk bertani. Dengan pekerjaannya sebagai seorang guru honorer dan istrinya yang bekerja sebagai pegawai kontrak di Kantor Desa Bangli serta memiliki seorang anak yang masih balita mengakibatkan penghasilannya hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, sementara untuk keperluan yang bersifat mendesak ia akan menggunakan penghasilan dari warungnya. Walaupun memiliki sebuah warung, namun penghasilannya tetap tidak

seberapa karena hanya buka di sore hari saja. Dengan adanya pinjaman dari LPD, Made Ady mengaku memiliki kesempatan untuk berusaha dalam meningkatkan perekonomian keluarganya yaitu dengan menanam bunga gemitir dan tanaman dengan masa panen singkat di lahan yang dimilikinya. Hasil panen tanaman dengan umur singkat dapat membantu kebutuhan sehari-harinya. Sementara hasil panen berupa bunga gemitir biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi jika mendekati hari raya keagamaan karena permintaan pasar yang tinggi. Akibatnya kebutuhan untuk sehari-hari, kebutuhan anak, serta kebutuhan untuk upacara keagamaan di pura ataupun kebutuhan untuk santunan antar warga terpenuhi. Sementara sisa pinjamannya digunakan untuk menambah modal di warungnya. Dengan pinjaman kredit yang didapatnya, perputaran modal untuk kegiatan bertani dan usaha warungnya dapat dilakukannya dengan optimal. Oleh karena itu, ia dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung untuk keperluan-keperluan yang bersifat mendesak. Ia mengaku, dengan adanya pandemi Covid-19 dan akhirnya mendapat pinjaman kredit dari LPD ia sadar untuk akhirnya memiliki simpanan uang untuk keperluan-keperluan darurat yang mungkin terjadi.

Selain itu, letak Desa Adat Gunung Kangin yang cukup strategis, yaitu merupakan kawasan yang dikelilingi oleh sawah dan ladang, akses ke pasar yang dekat serta merupakan kawasan pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat yang cukup maju. Sehingga banyak dibuka bank-bank nasional dan daerah di sekitarnya untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Beberapa bank yang dekat dengan Desa Adat Gunung Kangin antara lain, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Dengan adanya bank-bank ini tentunya kemungkinan untuk menggeser kemungkinan

masyarakat menjadi nasabah LPD Gunung Kangin, namun kemungkinan itu tidak terjadi. Bahkan walaupun keberadaan bank-bank tersebut telah ada sebelum terjadi pembaharuan pada sistem dan kepengurusan LPD. Namun demikian, LPD Desa Adat Gunung Kangin tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai wadah transaksi simpan pinjam masyarakat desa. Hal ini cukup menarik dikarenakan LPD masih dijalankan dengan sistem tradisional yang berkaitan erat dengan *awig-awig* masyarakat setempat. Namun peningkatan perilaku pengelolaan keuangan masyarakat yang ditunjukkan dengan intensitas menabung yang cukup tinggi menunjukkan perekonomian masyarakat desa mulai perlahan naik, perilaku ini perlu diketahui apakah perilaku pengelolaan uang masyarakat desa telah benar-benar bergeser dari menabung di tempat penyimpanan uang secara tradisional ke penyimpanan ke sistem bank atau LPD serta telah memiliki kesadaran memiliki dana untuk masa mendatang dengan perilaku pengelolaan keuangan yang baik.

Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat di Provinsi Bali sampai saat ini cukup pesat. Keberadaan LPD terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sekaligus menyangga tumbuh dan berkembangnya budaya Bali. LPD tidak saja memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan seperti tabungan masyarakat desa, tetapi juga telah menjadi solusi atas keterbatasan akses dana (kredit) bagi masyarakat pedesaan. Secara normatif LPD sedikit demi sedikit dapat memerankan fungsinya dengan baik sekaligus membantu masyarakat untuk meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan pribadinya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang muncul di masyarakat sebagai berikut.

1. Kemunduran perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19
2. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pengelolaan keuangan pribadinya sehingga tujuan keuangan menjadi tidak jelas, uang yang dimiliki oleh masyarakat cenderung untuk keperluan jangka pendek saja.
3. Banyak masyarakat yang memerlukan kredit dalam situasi darurat, namun mengalami penolakan.
4. Masyarakat Desa Adat Gunung Kangin memiliki kebiasaan menyimpan uang di bawah kasur dan atau almari, karena tidak mengerti sistem perbankan/LPD.
5. Para pedagang, pegawai, bendesa adat, dan anggota yang memiliki dana lebih telah menggunakan LPD untuk menyimpan dananya, diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat secara luas, sehingga perilaku pengelolaan keuangan pribadi masyarakat menjadi lebih baik.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat dibutuhkan dalam penelitian ini guna membuat penelitian ini lebih fokus disesuaikan dengan variabel-variabel penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana peranan LPD dalam mengubah perilaku pengelolaan keuangan masyarakat Desa Adat Gunung Kangin. Terutama bagaimana masyarakat dapat berubah perilaku pengelolannya akibat manfaat yang dirasakannya setelah menjadi nasabah LPD Desa Adat Gunung Kangin.

Jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat Desa Adat Gunung Kangin berbeda-beda yang tentunya memiliki pengaruh ke besaran penghasilan yang diterima, serta jangka waktu menerima penghasilan yang berbeda. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana masyarakat mengelola keuangannya sehingga dapat melakukan transaksi menabung hampir setiap hari kerja. Dan ketika harus mendapatkan pinjaman kredit, bagaimana cara masyarakat dalam menggunakan pinjaman tersebut secara optimal dan melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu. Penerapan sistem jemput bola LPD Desa Adat Gunung Kangin selanjutnya dapat menjadi kesadaran menabung sendiri, datang sendiri ke LPD karena LPD akan menjadi solusi masalah keuangan di Desa Adat Gunung Kangin.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku pengelolaan keuangan pribadi masyarakat Desa Adat Gunung Kangin sebelum menjadi nasabah LPD?
2. Bagaimana perubahan perilaku pengelolaan keuangan pribadi masyarakat Desa Adat Gunung Kangin setelah menjadi nasabah LPD?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perilaku pengelolaan keuangan pribadi masyarakat Desa Adat Gunung Kangin, sebelum menjadi nasabah LPD.
2. Untuk mengetahui perubahan perilaku pengelolaan keuangan pribadi masyarakat Desa Adat Gunung Kangin setelah menjadi nasabah LPD.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoretis

- a. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui mendalam mengenai proses pengelolaan keuangan pribadi masyarakat secara cermat dan keputusan masyarakat menjadi nasabah di LPD Desa Adat Gunung Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan serta peran LPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana, referensi, dan literatur pengembangan terkait perilaku pengelolaan keuangan pribadi dan wawasan terkait Lembaga Perkreditan Desa.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti bidang akuntansi sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian tingkat yang lebih lanjut.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan pribadi dengan lebih baik untuk menstabilkan keuangan di masa mendatang. Serta peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan bagi para peneliti selanjutnya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris dalam pengelolaan keuangan pribadi masyarakat dan sistem Lembaga Perkreditan Desa (LPD).